

LAPORAN

PENILAIAN TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH:

IMPLIKASI TERHADAP PENGADAAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE PROCUREMENT*)

TRIANGULASI RESEARCH INDONESIA

LAPORAN

PENILAIAN TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: IMPLIKASI TERHADAP PENGADAAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE PROCUREMENT*)

Penyusun / Peneliti	Tim Triangulasi Research Indonesia
Lembaga Kajian	Triangulasi Research Indonesia
Tanggal Publikasi	10 September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan riset ini menganalisis hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Surat Nomor 1550/D.2.1/01/2026. Penilaian ITKP 2025 menempati posisi strategis sebagai indikator meso dalam skema Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Nasional pada masa transisi. Hasil evaluasi mencakup tiga indikator utama: (1) Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (terdiri dari SIRUP, e-Tendering, Non e-Tendering/Non e-Purchasing, e-Katalog, Toko Daring, dan e-Kontrak), (2) Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), serta (3) Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Berdasarkan analisis terhadap klaster Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ditemukan variasi performa tata kelola pengadaan yang signifikan. Klaster Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi secara umum menunjukkan pencapaian ITKP yang relatif tinggi (dominan predikat Sangat Baik dan Baik), disokong oleh tingkat kematangan UKPBJ serta kapasitas SDM yang kuat. Sebaliknya, pada klaster Kabupaten dan Kota, masih dijumpai disparitas yang tinggi antara daerah berkinerja unggul dengan daerah yang mengalami kendala kelembagaan serta digitalisasi.

Kondisi tata kelola ini berimplikasi langsung terhadap kesiapan implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (*Sustainable Public Procurement*/SPP). Ketergantungan pada pemanfaatan e-Katalog, Toko Daring, dan e-Kontrak yang transparan serta kematangan institusi UKPBJ menjadi prasyarat mutlak dalam mengintegrasikan kriteria ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, optimalisasi modul e-Purchasing hijau, serta akselerasi transformasi digital pada tingkat daerah guna memantapkan penerapan pengadaan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) memegang peranan krusial dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seiring berkembangnya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), PBJ tidak lagi hanya dipandang sebagai fungsi administratif untuk memenuhi kebutuhan operasional, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi terintegrasi, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebagai bagian dari indikator meso Indeks Reformasi Birokrasi.

Landasan hukum penilaian ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 serta Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025. Penilaian ITKP mengukur kinerja instansi pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) melalui tiga indikator utama:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Bobot Aksesibilitas & Transparansi): Mencakup perencanaaan dan pelaksanaan digital melalui SIRUP, e-Tendering, Non e-Tendering/e-Purchasing, e-Katalog, Toko Daring, dan penatausahaan e-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ: Menilai ketersediaan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JABFUNG PBJ) dan personel berlatar sertifikasi kompetensi yang memadai.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ: Menilai kapasitas kelembagaan, proses bisnis, serta peran strategis Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menuju tingkat kematangan Proaktif atau Unggul.

Pentingnya tata kelola PBJ yang andal erat kaitannya dengan agenda Pengadaan Berkelanjutan (*Sustainable Procurement*). Pengadaan berkelanjutan menuntut kriteria lingkungan (misal: pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, produk ramah lingkungan), kriteria sosial (pemberdayaan UMKM, kesetaraan), dan kriteria ekonomi jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan pengadaan berkelanjutan sangat bergantung pada sejauh mana instansi telah mengadopsi sistem digital (seperti e-Katalog dan e-Kontrak) serta memiliki SDM dan UKPBJ yang matang untuk menyusun spesifikasi dan mengevaluasi rantai pasok hijau.

2. ANALISIS TATA KELOLA PENGADAAN BERDASARKAN KLASTER INSTANSI

Analisis kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data ITKP Tahun 2025 mengelompokkan instansi pemerintah ke dalam tiga klaster utama:

1. Klaster Kementerian dan Lembaga (K/L). Klaster Kementerian dan Lembaga menunjukkan kinerja tata kelola yang paling solid dan stabil secara agregat. Mayoritas instansi dalam klaster ini berhasil meraih predikat Sangat Baik (skor ITKP > 90.00) dan Baik (skor ITKP 70.00 - 89.99). Pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di lingkungan K/L secara umum mencapai nilai sempurna atau mendekati 10.00. Integrasi e-Tendering dan e-Kontrak juga tergolong sangat tinggi. Hal ini mencerminkan tingginya kepatuhan terhadap transparansi anggaran awal dan pencatatan transaksi elektronik. Nilai Indikator Tingkat

Kematangan UKPBJ pada Kementerian mayoritas menyentuh angka maksimal (40.00). Kapasitas SDM PBJ di K/L terintegrasi baik dengan jalur karier Fungsional PBJ, meskipun terdapat beberapa lembaga baru/transisi (misalnya Kementerian Koordinator baru atau Badan Gizi Nasional) yang masih berada pada tahap penyesuaian kapasitas SDM dan instrumen pengadaannya. Terdapat sebagian kecil instansi lembaga negara yang mendapat predikat Kurang, yang disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan indikator kematangan UKPBJ maupun pencatatan transaksi non-e-Tendering/e-Katalog.

2. Klaster Pemerintah Daerah Provinsi. Secara agregat, Pemerintah Daerah Provinsi menampilkan performa tata kelola pengadaan yang sangat baik dan konsisten di seluruh Indonesia. Sebagian besar Pemerintah Provinsi meraih predikat Sangat Baik dan Baik. Hampir seluruh Pemerintah Provinsi telah mencatatkan nilai maksimal (40.00) pada Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan UKPBJ di tingkat provinsi sebagai center of excellence pengadaan daerah telah berjalan efektif. Pemprov menjadi pionir dalam pemanfaatan Toko Daring (Bela Pengadaan) dan e-Katalog Lokal, dengan raihan skor Toko Daring rata-rata 1.00 dan e-Katalog yang terus meningkat. Meskipun secara umum tinggi, wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua (seperti Provinsi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan) masih berada pada kategori Cukup atau Kurang. Hal ini dipicu oleh keterbatasan infrastruktur digital, proses pembentukan struktur UKPBJ yang masih berjalan, serta keterbatasan kuantitas Personel Fungsional PBJ bersertifikat.
3. Klaster Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Klaster Kabupaten dan Kota merupakan kelompok dengan jumlah instansi terbesar dan tingkat variabilitas/disparitas kinerja paling tinggi. Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali, dan beberapa daerah di Kalimantan/Sumatera berhasil mencapai predikat Baik hingga Sangat Baik berkat dorongan digitalisasi komprehensif. Namun, sebagian Kabupaten di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih mencatatkan nilai di bawah 60.00 (Cukup dan Kurang). Banyak UKPBJ di tingkat Kabupaten masih berstatus ad-hoc atau belum mencapai tingkat Kematangan Proaktif (skor kematangan berkisar antara 4.44 hingga 26.67). Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM di beberapa kabupaten tergolong rendah (sering kali di bawah 10.00), yang disebabkan oleh tingginya angka turnover personel PBJ serta minimnya Pejabat Fungsional PBJ permanen. Penggunaan e-Katalog Lokal dan Toko Daring di sebagian kabupaten belum berjalan optimal (skor 0.00), sehingga alokasi pengadaan daerah masih banyak bertumpu pada metode konvensional.

3. IMPLIKASI TERHADAP PENGADAAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE PROCUREMENT*)

Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (SPP) mensyaratkan keterpaduan antara sistem pengadaan elektronik yang transparan, SDM yang kompeten, dan UKPBJ yang matang. Berdasarkan hasil data ITKP 2025, implikasi terhadap penerapan pengadaan berkelanjutan dijelaskan sebagai berikut:

1. Digitalisasi Sebagai Enabler Pengadaan Hijau. Pemanfaatan e-Katalog, Toko Daring, dan e-Kontrak berperan langsung dalam mendukung pengadaan berkelanjutan. Melalui e-Katalog Lokal dan Nasional, LKPP dan instansi pemerintah dapat mencantumkan label *eco-*

friendly/ramah lingkungan pada produk (misalnya pendingin ruangan hemat energi, kertas daur ulang, kendaraan listrik, atau bahan bangunan ramah lingkungan). Instansi dengan skor e-Katalog dan e-Kontrak yang tinggi memiliki kesiapan infrastruktur yang jauh lebih baik untuk menerapkan *Green Public Procurement*.

2. Peran Kematangan UKPBJ dalam Perencanaan Pengadaan. UKPBJ yang berada pada tingkat kematangan Proaktif (skor 40.00) tidak lagi hanya berfokus pada proses pemilihan penyedia, tetapi sudah masuk pada tahap perencanaan strategis. UKPBJ matang mampu menerapkan metode *Life Cycle Costing* (LCC) atau Analisis Biaya Daur Hidup, yang menilai harga produk tidak hanya dari nilai beli awal, melainkan juga biaya operasional, perawatan, dan dampak pembuangan limbah di akhir masa pakai.
3. Kompetensi SDM Sebagai Kunci Penyusunan Spesifikasi Teknis. Penerapan pengadaan berkelanjutan membutuhkan kompetensi SDM PBJ yang memahami standar sertifikasi ekolabel dan kriteria keberlanjutan sosial. Rendahnya nilai indikator SDM di sejumlah daerah dapat memicu risiko kegagalan adopsi pengadaan berkelanjutan, karena personel pengadaan cenderung memilih barang berdasarkan harga terendah (lowest price) ketimbang nilai keberlanjutan jangka panjang (*value for money*).

4. KESIMPULAN

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2025 memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kesiapan tata kelola PBJ di Indonesia dalam mendukung Indeks Reformasi Birokrasi. Klaster Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi secara umum mencatatkan kinerja ITKP yang tinggi, dengan tingkat kematangan UKPBJ serta pemanfaatan sistem digital yang matang. Disparitas kinerja masih menjadi tantangan utama pada klaster Pemerintah Kabupaten/Kota dan wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), terutama pada indikator pemenuhan SDM PBJ dan optimalisasi e-Katalog/Toko Daring. Tata kelola PBJ yang kuat (ITKP Sangat Baik) berbanding lurus dengan kesiapan instansi dalam mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (*Sustainable Procurement*).